

PERAN AKUNTANSI BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN ETAP DALAM PEMBERDAYAAN UMKM

USTMAN

usmanrabe89@gmail.com

SUBHAN

lecture.unira.acc@gmail.com

CITRA LARASHATI SURYA

citra.larashati.surya@gmail.com

Universitas Madura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat di Pamekasan secara keseluruhan bisa mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Target khususnya yaitu untuk memberikan informasi mengenai praktik akuntansi dan pengambilan keputusan oleh pelaku usaha UMKM.

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh observasi langsung dari penyebaran kuesioner kepada seluruh perusahaan UMKM di Kabupaten Pamekasan. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada reponden, sehingga diketahui peran akuntansi berdasarkan laporan keuangan ETAP dalam pemberdayaan UMKM.

Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan responden UMKM tersebut peran akuntansi berdasarkan SAK ETAP sangat membantu perusahaan UMKM untuk semakin berkembang. Dengan adanya laporan keuangan pada UMKM dapat meningkatkan penjualan per tahunnya dan dapat mengembangkan usaha dengan menambah modal dari kreditur.

Tetapi dari 22 sampel yang diambil, lebih dari 50% perusahaan UMKM belum menggunakan sistem akuntansi berupa laporan keuangan SAK ETAP. Mengingat sangat minimnya perusahaan UMKM memahami sistem akuntansi. Pemahaman mengenai SAK ETAP dinilai sangat rendah di Kabupeten Pamekasan.

Kata kunci: *Praktik akuntansi, Pemberdayaan UMKM, SAK ETAP*

ABSTRACT

This study analyze to make the community in Pamekasan as a whole develop micro, small and medium enterprises (MSMEs). The specific target is to provide information on accounting practices and decision making by MSME business actors.

The data in this study are primary data obtained by direct observation of the distribution of questionnaires to all MSME companies

in Pamekasan. The data collection technique is by giving questions to respondents, so that the role of accounting is based on ETAP's financial reports in empowering MSMEs.

The results of the analysis show that based on the MSME respondents, the role of accounting based on SAK ETAP greatly helps MSME companies to develop. With the existence of financial reports on MSMEs can increase sales per year and can develop businesses by adding capital from creditors.

But from the 22 samples taken, more than 50% of MSME companies have not used the accounting system in the form of SAK ETAP financial statements. Given the very minimum number of MSME companies understand the accounting system. An understanding of SAK ETAP is considered very low in Pamekasan.

Keywords: *Accounting Practices, Empowering MSMEs, SAK ETAP*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada saat menempuh sekolah di tingkat menengah pertama (SMP/SLTP) kita sering mendengar apa yang namanya laporan keuangan. Pada masa itu sering disebut dengan pelajaran pembukuan. Kemudian menginjak sekolah menengah atas (SMA/SLTA) kita juga disuguhkan pelajaran akuntansi, yang menjelaskan alur transaksi keuangan sampai membentuk laporan keuangan. Begitu juga pada masa-masa kuliah, hampir di tiap jurusan ada mata kuliah akuntansi. Sekarang peran akuntansi ini sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha, misalnya pedagang kaki lima (PKL), apoteker, petani, nelayan, maupun bisnis ekonomi kreatif lainnya.

Kabupaten pamekasan memiliki luas 732,85 Km² yang terdiri dari 13 kecamatan, 11 kelurahan dan 178 desa. Menurut angka kependudukan, populasi di kabupaten Pamekasan tahun 2013 sebanyak 818.662 jiwa. Dilihat dari komposisinya kebanyakan terdiri dari usia produktif. Melihat populasi yang banyak ini, tidak diimbangi dengan ketersediaannya lapangan perkerjaan. Sehingga kebanyakan masyarakat di Pamekasan mulai berinovasi membuka usaha yang mandiri berupa UMKM. Banyaknya UMKM yang muncul ini bisa dikatakan menjadi berkah sekaligus masalah bagi masyarakat. Dimana UMKM baru selalu bermunculan dengan dibarengi tumbanganya UMKM yang lama diakibatkan tidak dapat mempertahankan usahanya. UMKM sulit bertahan dari pesaing baru dikarenakan tidak memiliki informasi keuangan dan sulit melakukan inovasi baru karena tidak tersedianya modal. Oleh sebab itu, peran akuntan pada usaha UMKM sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga dapat

mengambil keputusan ekonomi dan diharapkan memiliki kontribusi untuk keberlangsungan usaha.

Pada tahun 2010 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 52,2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan bagi UMKM untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini. UMKM mampu bertahan dari krisis yang pernah terjadi dinegeri ini, seperti krisis ekonomi 1997-1998 dan krisis global 2008. Di saat banyak perusahaan besar bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali (Rudiantoro dan Siregar 2012).

Potensi yang besar dari UMKM tersebut sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha. Sebenarnya terdapat program pembiayaan UMKM yang dijalankan oleh pemerintah. Pembiayaan ini dapat diperoleh jika perusahaan UMKM memberikan suatu informasi berupa laporan keuangan kepada pemberi modal atau para kreditur.

Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami, relevan, meterialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, dan tepat waktu serta keseimbangan antara biaya dan manfaat (IAI, 2013).

Selama ini banyak dari UMKM belum menyusun laporan keuangan karena ketiadaan standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Akibat hal itu perbankan menerapkan kriteria dan syarat penyaluran kredit yang sama antara UMKM dan usaha besar, yang sebenarnya tidak dapat diukur dari kemampuan antar keduanya. Terkait hal itu Standar Akuntansi Keuangan untuk UMKM sebagai infrastruktur UMKM agar layak dari sisi peraturan bank harus berbeda dengan SAK non UMKM. Standar inilah yang kita kenal sekarang sebagai SAK ETAP, dimana UMKM telah dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Narsa, Widodo, dan Kurnianto (2012) berpendapat bisnis dalam skala apapun, laporan keuangan berperan sangat penting, disamping sebagai acuan bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan, juga terutama untuk memperoleh gambaran kondisi kinerja keuangan perusahaan, untung dan rugi. Begitu juga pada skala usaha mikro kecil dan menengah, catatan yang baik dan tertib akan membantu seorang pelaku usaha mengetahui transaksi apa saja yang telah dilakukan usahanya selama periode tertentu. Ediraras (2010) menyarankan

kepada pelaku UKM yang belum menerapkan akuntansi agar mulai menerapkan akuntansi. Sedikit apapun transaksi yang terjadi, sesederhana apapun metode akuntansi yang dipakai, namun hasil akuntansi akan memberikan manfaat yang besar bagi kelangsungan UKM itu sendiri.

Anggraini dan Nasution (2013) berpendapat pada saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran.

Dari adanya masalah-masalah yang muncul dan dihadapi oleh pelaku UMKM, maka pada tanggal 5 November tahun 2007 oleh presiden SBY diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dilanjutkan pada era presiden Joko Widodo. Selain program KUR yang telah diluncurkan oleh presiden SBY, banyak kredit usaha lainnya yang diberikan oleh perbankan dengan akad syariah maupun konvensional, lembaga keuangan mikro (LKM), koperasi, pegadaian dan sebagainya.

Perbankan, LKM, koperasi, pegadaian dan sebagainya itu tentunya tidak mau mengalami kerugian pada saat memberikan kredit pada pelaku UMKM. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum mereka memberikan atau menyalurkan dananya kepada pelaku UMKM.

Untuk memperoleh modal usaha dari perbankan, LKM, koperasi, pegadaian dan sebagainya tersebut. Dibutuhkan laporan keuangan yang andal sebagai suatu informasi keuangan sehingga dapat dijadikan acuan sebagai pengambilan keputusan oleh manajemen dan pihak luar (kreditur). Disinilah peran akuntan dalam membentuk informasi berupa laporan keuangan yang diharapkan dapat memberdayakan pelaku UMKM.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang 1) tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan

untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum. Selain adanya SAK ETAP tersebut, kemudahan lain bagi UMKM dalam hal pembukuan akuntansi adalah semakin banyaknya *software* akuntansi yang dapat digunakan UMKM. Ke depannya diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan sehingga lebih mudah bagi para pengusaha UMKM untuk memperoleh pembiayaan (Rudiantoro dan Siregar 2012).

Fakta yang ada dan kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kesulitannya dalam membentuk informasi berupa laporan keuangan. Mereka kurang memahami peran akuntansi dan pentingnya membuat laporan keuangan pada suatu bisnis, hal ini menjadikan penelitian ini cukup layak untuk dilakukan terutama di Kabupaten Pamekasan. Harapannya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada masyarakat atau bahkan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu bagaimana peran akuntansi berdasarkan laporan keuangan ETAP bisa berkontribusi terhadap pemberdayaan UMKM di Pamekasan. Rumusan masalah ini dapat dijawab dengan melakukan observasi langsung lapangan, bisa dengan cara survey dan wawancara terhadap pihak yang terkait. Lingkup penelitian ini hanya pelaku UMKM di Kabupaten Pamekasan yang berpusat di Kota Pamekasan, tidak mencakup seluruh Kabupaten Pamekasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah peran akuntansi berbasis laporan keuangan ETAP dapat memberdayakan UMKM di Kabupaten Pamekasan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi

Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2013). Laporan keuangan yang dihasilkan yaitu antara lain; laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.

2. Sistem Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Penyediaan informasi akuntansi bagi usaha kecil juga diperlukan khususnya untuk akses subsidi pemerintah dan akses tambahan modal

bagi usaha kecil dari kreditur (Bank) (Sakri et al. 2018). Selain itu fungsi sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi laba yang dapat membantu pemilik atau pihak lain dalam mengestimasi kekuatan laba untuk menaksir resiko dalam investasi dan kredit (Ustman, 2017).

Sistem informasi akuntansi menurut Musmini (2013) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari (1) informasi operasi, informasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan yang bersifat rutin, atau kegiatan sehari-hari. Misalnya penjualan produk, persediaan barang, piutang, biaya, utang, dan lain-lain. (2) informasi akuntansi keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi hal ini ditujukan terutama bagi pihak luar perusahaan. (3) informasi akuntansi manajemen, informasi yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, implementasi, dan pengendalian perusahaan, meliputi identifikasi, pengukuran, analisis, penyajian, interpretasi, dan komunikasi informasi. (4) informasi akuntansi pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Manajemen juga perlu informasi beban kewajiban pajak perusahaan.

3. Standar Akuntansi Keuangan

Proses menghasilkan informasi berupa laporan keuangan pada suatu perusahaan, tidak dapat dilakukan sesuai selera dan keinginan masing-masing dari setiap orang yang satu dengan yang lainnya. Proses menghasilkan informasi keuangan ini telah diatur sesuai standar yang menjadi acuan bagi setiap perusahaan di dunia. Di Indonesia, standar keuangan yang menjadi acuan bagi perusahaan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Secara umum SAK terbagi menjadi tiga, yaitu SAKIFRS, SAK ETAP, dan SAK Syariah. 2 dibentuk oleh DSAS menghasilkan SAK-IFRS dan ETAP, kemudian 1 dibentuk oleh DSAS menghasilkan SAK-Syariah. Untuk lebih jelasnya, berikut penjabarannya dari ketiga jenis SAK tersebut.

1. SAK IFRS

Standar Akuntansi Keuangan ini disusun dengan mendaptasi IFRS (*International Financial Reporting Standards*). SAK ini disusun untuk organisasi yang memiliki akuntabilitas publik.

Ciri-ciri signifikan dari entitas yang memiliki akuntabilitas publik:

- a. Entitas tersebut telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pendaftaran kepada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan sekuritas di pasar modal. Ini berarti setiap badan usaha yang telah terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) atau istilah lain yaitu telah *go public*, karena memiliki pertanggungjawaban kepada publik.

- b. Entitas tersebut menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia bagi sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi. Badan usaha seperti ini menyerap, menyimpan, dan mengelola dana masyarakat yang cukup banyak, maka memiliki pertanggungjawaban kepada publik.

2. SAK-ETAP

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan ini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan ini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contohnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam mengelola usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit.

Badan usaha yang tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik adalah:

- Entitas Perorangan
- Firma
- CV (*commanditaire Vennootschap*)
- Perseroan Terbatas, yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
- Koperasi

3. SAK-SYARIAH

Sehubungan perkembangan transaksi dan entitas syariah yang pesat, dirasa perlu menyusun seperangkat Standar Akuntansi Syariah. Badan usaha yang menggunakan SAK-Syariah yaitu badan usaha yang berbasis syariah misalnya Bank Syariah, koperasi syariah, dll.

Menurut Rudiantoro dan Siregar (2012) SAK ETAP bertujuan untuk dapat mengakomodir kebutuhan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Selain itu juga untuk membantu membuat standar akuntansi yang dapat digunakan oleh UMKM karena sifatnya yang lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan dengan SAK Umum. Hal terpenting dari implementasi SAK ETAP

adaah pemahaman yang baik atas SAK ETAP tersebut oleh UMKM tersebut.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Semua kegiatan yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang memiliki aktivitas bisnis komersial yang telah memenuhi kriteria dengan perputaran penghasilan di bawah 4,8 Miliar dapat dikategorikan sebagai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM tersebut adalah:

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 yaitu dengan penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 pertahun.

2. Usaha Kecil

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun.

3. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia no 10 tahun 1999, dikatakan usaha menengah jika memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

5. Penelitian Terdahulu

Narsa, Widodo, dan Kurnianto (2012) meneliti kesiapan UMKM dalam implementasi Standar Akuntansi Keuangan ETAP untuk meningkatkan akses modal perbankan. Kendala yang dihadapi UMKM selain modal adalah penerapan manajemen yang profesional. Sistem pembukuan UMKM selama ini umumnya sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku). Padahal laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu mereka dalam upaya pengembangan bisnisnya secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kendala UMKM adalah tidak memiliki laporan keuangan sesuai standar SAK-ETAP dan UMKM yang memiliki catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat dibandingkan UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama. Salah satu yang mendorong kemajuan UMKM tersebut adalah kemampuan mengakses kredit dari perbankan, sehingga masalah kesulitan permodalan dapat diatasi.

Ediraras (2010) menganalisa para pelaku UKM dalam penerapan akuntansi, pemanfaatan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan usaha dan sebagai alat untuk peningkatan kinerja UKM. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar UKM telah menerapkan akuntansi, dan dari hasil akuntansi tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan usaha.

Musmini (2013) meneliti sistem informasi akuntansi untuk menunjang pemberdayaan pengelolaan usaha kecil. Peneliti berpendapat bahwa sistem informasi akuntansi usaha kecil perlu ditata lebih baik, sehingga dapat memberikan informasi tentang penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, persediaan, harga pokok penjualan dan laba kotor untuk setiap periode. Tahap berikutnya, jika sistem manual tersebut sudah dirancang dengan output berupa informasi yang cukup memadai, maka dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan manajer.

Anggraini dan Nasution (2013) meneliti peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian dari 67 responden yang terdiri dari usaha perdagangan sebanyak 30 orang, toko serba ada/supermarket sebanyak 13 orang, usaha jasa sebanyak 10 orang, usaha rumah makan sebanyak 8 orang, dan jenis usaha industri sebanyak 6 orang. Dapat disimpulkan bahwa besarnya modal kredit usaha rakyat berpengaruh positif terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM. Hal ini dapat dikatakan semakin besar jumlah modal kredit usaha rakyat maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Isinya hanya penjabaran terkait data hasil penelitian yang menjadi temuan di lapangan. Kabupaten kota Pamekasan terdiri dari 9 kelurahan. Dari masing-masing kelurahan akan diambil sampel berdasarkan jenis usaha prioritas (perdagangan, supermarket, rumah makan, jasa, dan industri). Secara total akan ada maksimal 45 sampel usaha UMKM. Melihat jumlahnya yang sedikit, maka hal ini cukup mudah untuk dilakukan. Berikut ini 9 Kelurahan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Tabel kelurahan di kabupaten Pamekasan

No	Kelurahan
1	Barurambat kota
2	Bugih
3	Gladak Anyar
4	Jungcangcang
5	Kangenan
6	Kolpajung
7	Kowel
8	Parteker
9	Patemon

Sumber: badan pusat statistik

Data diperoleh dengan melakukan observasi langsung ke lapangan. Caranya dengan melakukan wawancara atau meminta data yang diperlukan kepada pihak terkait melalui kunjungan langsung, baik itu pegawai atau pemilik yang melakukan pencatatan akuntansi berupa laporan keuangan.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan kuesioner penelitian yang pernah dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012) dengan beberapa pertanyaan kepada responden, sehingga diketahui peran akuntansi berdasarkan laporan keuangan ETAP dalam pemberdayaan UMKM. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran UMKM di Kabupaten Pamekasan

UMKM yang menjadi sampel penelitian ini yaitu terdiri dari perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Total ada 22 UMKM yang menjadi objek penelitian dari 9 Kelurahan di Kabupaten Pamekasan.

Bentuk kepemilikan perusahaan dari total 22 UMKM tersebut, seluruhnya dimiliki oleh orang pribadi. Kepemilikan pribadi terdiri dari usaha keluarga yang secara turun temurun beroperasi sampai sekarang dikategorikan sebagai usaha yang periode operasinya lebih

dari 5 tahun sebanyak 8 perusahaan atau 36 %, dan adapula usaha yang baru dibangun dikategorikan sebagai periode usaha yang beroperasi kurang dari 5 tahun sebanyak 14 atau 64 %.

UMKM yang memiliki legalitas badan usaha lebih sedikit dari pada yang belum memiliki legalitas usaha. Responden yang menjawab memiliki legalitas usaha ada 7 perusahaan atau 31%, sedangkan yang belum memiliki legalitas usaha sebanyak 15 perusahaan atau setara 69%.

UMKM yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang sebanyak 2 atau 9%, UMKM yang memiliki karyawan lebih dari 5 orang sebanyak 4 atau 18%, dan yang memiliki karyawan kurang dari 5 orang sebanyak 5 atau 23% serta yang tidak memiliki karyawan sebanyak 11 atau 50%.

Pendidikan terakhir pelaku UMKM tersebut berdasarkan hasil responden yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 14% lulusan S2, sebanyak 5 pemilik usaha atau 23% lulusan S1, dan 14 orang pemilik usaha UMKM atau sebesar 64% yang lulusan SMA/MA.

Latar belakang pendidikan pelaku UMKM tersebut hanya ada 1 yang lulusan sarjana manajemen, dan ada 1 yang lulusan sarjana akuntansi. Sisanya sebanyak 20 orang pemilik usaha UMKM memiliki latar belakang diluar ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

Perusahaan yang melakukan penjualan per tahunnya dibawah Rp. 100.000.000 rupiah sebanyak 13 perusahaan dan perusahaan yang penjualannya diantara Rp. 100.000.000 – 499.000.000 sebanyak 5 perusahaan, serta perusahaan yang penjualannya diantara Rp. 500.000.000 – 2.500.000.000 sebanyak 4 perusahaan.

Sumber pendanaan perusahaan dari 22 perusahaan, sebanyak 19 perusahaan menggunakan 100% modal sendiri, 1 perusahaan menggunakan 50% - 74 % modal sendiri, dan 2 perusahaan menggunakan kurang dari 50% modal sendiri. Seluruhnya dari perusahaan tersebut tidak menggunakan jasa/kredit perbankan untuk memperoleh modal.

2. Informasi Keuangan

UMKM yang sudah menggunakan sistem akuntansi dengan pencatatan manual maupun terkomputerisasi menggunakan software akuntansi sebanyak 10 atau 46%, dan yang belum menggunakan sistem akuntansi sisanya yaitu sebanyak 12 atau 54%. Sebagian besar UMKM di Kabupaten Pamekasan belum menggunakan sistem akuntansi untuk menjalankan usahanya.

Jika *ditreatment* dengan cara diklasifikasikan persentase usaha yang menggunakan akuntansi pada usaha kepemilikan secara turun temurun atau yang periode usahanya sudah berjalan lebih dari 5 tahun dibandingkan dengan usaha yang beroperasi kurang dari 5 tahun. Untuk usaha kepemilikan pribadi secara turun temurun yang periode usahanya lebih dari 5 tahun yang berjumlah 8 atau 36%, tidak ada yang

menggunakan sistem akuntansi. Sedangkan usaha yang dikategorikan usaha yang beroperasi kurang dari 5 tahun sebanyak 10 atau 46% telah menggunakan sistem akuntansi dan mengetahui SAK ETAP dari seminar dan lainnya, dan sisanya belum menggunakan sistem akuntansi sebanyak 4 atau 18%. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, yaitu:

- A. Ada yang beranggapan usaha turun temurun itu sudah menjadi kebiasaan, dan sulit mengubah kebiasaan terdahulu.
- B. Usaha turun temurun itu beranggapan sudah memiliki pasar
- C. Ketidakhahaman dalam membuat sistem akuntansi
- D. Akuntansi sangat rumit dan tidak ada waktu untuk belajar karena telah tersita waktu untuk bekerja

Ternyata UMKM yang berdiri kurang dari 5 tahun sebagian besar sudah menggunakan sistem akuntansi. Dilihat dari hasil persentasenya sebesar 46% dan ada sebagian usaha baru yang belum menggunakan sistem akuntansi. UMKM yang menggunakan sistem akuntansi itu menjalankan usahanya berdasarkan hasil dari laporan keuangan yang memiliki manfaat untuk mengambil keputusan, yaitu:

1. Penilaian kinerja usaha sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang
2. Berguna sebagai pengambilan keputusan persediaan barang apa saja yang harus dipertahankan, atau pertimbangan pembelian bahan baku untuk produksi.
3. Mengajukan/permohonan pembiayaan bank sebagai pengembangan usaha
4. Penambahan/pengurangan karyawan, atau pertimbangan bonus karyawan
5. Penambahan aset usaha
6. Pemberian diskon
7. Promosi usaha

Melihat pembahasan di atas, hasilnya diketahui bahwa perusahaan UMKM yang belum menggunakan sistem akuntansi masih sangat banyak. Perusahaan yang masih menggunakan sistem turun temurun dari keluarga dan juga perusahaan yang tidak menggunakan sistem keuangan ada sebanyak 12 perusahaan UMKM. Perkembangan perusahaan UMKM ini dikategorikan usaha yang sulit berkembang dilihat dari penjualan per tahunnya yang dibawah Rp. 100.000.000. Begitupula dengan usaha yang dilakukan oleh pemiliknya untuk mengembangkan usahanya dengan cara melakukan pinjaman modal, tidak ada yang mendapat pinjaman dari investor/kreditur. Sehingga usaha yang dimiliki seluruhnya dari modal pribadi.

Berbeda dengan perusahaan UMKM yang sudah menggunakan sistem akuntansi, 10 perusahaan yang sudah menggunakan sistem

akuntansi dapat dengan mudah mengambil keputusan dalam menjalankan usahanya. Sehingga perkembangan usahanya dengan mudah berkembang dilihat dari penjualan per tahunnya yang sampai Rp. 100.000.000 – 2.500.000.000. Perusahaan UMKM yang sudah menggunakan sistem akuntansi berupa laporan keuangan dengan mudah mendapatkan modal dari investor/kreditur untuk mengembangkan usahanya.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan responden UMKM tersebut dalam penelitian ini, peneliti melihat dari peran akuntansi berdasarkan SAK ETAP sangat membantu perusahaan UMKM untuk semakin berkembang. Dengan adanya laporan keuangan pada UMKM dapat meningkatkan penjualan per tahunnya dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi yang dibutuhkan. Misalnya dengan pengambilan keputusan yang cepat yang merujuk pada informasi berupa laporan keuangan, juga dapat mengembangkan usaha dengan menambah modal dari kreditur.

Tetapi dari 22 sampel yang diambil, lebih dari 50% perusahaan UMKM belum menggunakan sistem akuntansi berupa laporan keuangan SAK ETAP. Mengingat sangat minimnya perusahaan UMKM memahami sistem akuntansi. Pemahaman mengenai SAK ETAP dinilai sangat rendah di Kabupeten Pamekasan.

Saran

Peneliti menyarankan kepada lembaga pemerintah atau swasta, isntitusi pelatihan pelaporan keuangan, sudah tidak lagi berfokus pada teknik dasar akuntansinya, mealinkan sudah pada tahapan pemahamana standar akuntansinya.

Lembaga-lembaga terkait juga diharapkan memberikan pelatihan atau seminar kepada para pelaku usaha UMKM, untuk kedepannya bisa memahami apa itu laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D dan Nasution, H,S. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(3): 105-116. 2013
- Ediraras, T, D. Akuntansi dan Kinerja UKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 2(15): 152-158. 2010

- IAI. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- Musmini, S, L. Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Rumah Makan Taliwang Singaraja). *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1): 62-81. 2013
- Narsa, M.I., Widodo, A. dan Kurnianto, S. Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi, Tahun XXII, No.3, Desember 2012*: 204-214
- Rudiantoro, R. Dan Siregar, S.V. Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1): 1-21. 2012
- Sakri,N. Majid, J. dan Juardi, M,S,S. Mengungkap Informasi Akuntansi Usaha Kecil (Sebuah Studi Fenomenologi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(2): 75-100. 2018
- Sumarsan, T. 2013. *Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*. Jilid 1. Indeks. Jakarta
- Ustman. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Biaya Modal Ekuitas Setelah Konvergensi SAK IFRS Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2(1): 34-48. 2017.